

Strategi Kolaborasi Pengembangan Wisata Berbasis Edukasi di *Clungup Mangrove Conservation* Desa Tambakrejo Kabupaten Malang

Muhamad Imron¹

M. Saiful Anwar²

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

²Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

imron.unira@gmail.com

Abstrak

Pengembangan wisata alam berbasis edukasi memiliki tantangan yang serius di ranah mempertahankan eksistensi dan keberlanjutan lingkungan. Setiap *stakeholder* yang ada harus berani menjamin keterlibatan mereka dapat memberi kontribusi yang positif bagi keberlangsungan ekosistem kawasan pantai. Model *Quintuple Helix* memberikan posisi yang signifikan bagi lingkungan alami masyarakat untuk memperoleh perhatian yang lebih. Berangkat dari realitas, penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi yang ideal bagi kolaborasi pengembangan wisata berbasis edukasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Adapun hasil dari penelitian ini berupa konsep strategi kolaborasi yang ideal untuk pengembangan wisata berbasis edukasi dengan model *Quintuple Helix*. Melalui model ini dapat memberikan modal tambahan berupa manajemen berbasis kualitas pembangunan yang efektif, keseimbangan alam yang terjamin, serta garansi terhadap generasi mendatang agar tetap dapat merasakan keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Kolaborasi, Wisata Edukasi, Lingkungan Alami

Abstract

Educational tourism-based natural tourism development has serious challenges in the realm of maintaining the existence and sustainability of the environment. Every existing stakeholder must have the courage to guarantee that their involvement can contribute positively to the sustainability of the coastal ecosystem. The Quintuple Helix model provides a significant position for the natural environment of the community to get more attention. Departing from reality, this study aims to find the ideal strategy for collaborative education-based tourism development. This research was conducted with a qualitative descriptive method, data collection was carried out by observation, interviews and document studies. The results of this study are in the form of a collaboration strategy concept that is ideal for education-based tourism development with the quintuple helix model. Through this model, it can provide additional capital in the form of effective quality-based development management, guaranteed natural balance, and guarantees against.

Keywords: Collaboration, Educational Tourism, Natural Environment

Pendahuluan

Ide pengembangan potensi wisata pada suatu kawasan tertentu saat ini dapat muncul dari siapa aja. Ide ataupun inisiatif mengembangkan potensi alam yang telah ada untuk dijadikan sebagai kawasan wisata misalnya dapat muncul dari kesadaran masyarakat setempat. Pada era saat ini, inisiasi tidak harus di dominasi oleh pemerintah selaku pengambil dan eksekutor keputusan (*policy*). Masyarakat melalui perkumpulan ataupun komunitas pada banyak tempat terbukti dapat memainkan kreatifitasnya dalam menuangkan desain kawasan wisata tertentu yang layak untuk dikunjungi dan pada saat yang bersamaan juga dapat berdampak pada peningkatan ekonomi lokal tersebut. Wisata air Umbul Ponggok dan Pujon Kidul misalnya telah menyajikan contoh betapa kreatifitas masyarakat setempat dapat memperoleh banyak apresiasi dari banyak pihak. Apresiasi dapat berupa kunjungan dari wisatawan atau juga bisa berupa naiknya pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

Tren wisata saat ini sedang mengarah pada eksplorasi potensi alam. Dan Kabupaten Malang memiliki segala kelebihan dalam hal tersebut. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten yang berada Jawa Timur yang memiliki bentangan pantai yang cukup luas dan panjang. Pemerintah daerah kabupaten Malang juga telah menggunakan jargon *The Heart of East Java* yang memiliki maksud bahwa malang sebagai jantungnya Jawa Timur, demikian salah satunya karena begitu banyaknya potensi wisata alam yang tersimpan baik itu kawasan pegunungan ataupun bentangan pantai.

Kembali pada perihal ide dan inisiatif pengembangan wisata, inisiasi yang muncul dari akar bawah (masyarakat) seringkali bersifat *genuine* karena memang asli dan murni dari kesadaran yang terbangun sebagai akibat dari akumulasi peristiwa yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Akumulasi peristiwa bencana alam misalnya, ternyata dapat menstimulus mereka yang terdampak untuk membangun satu konsensus bersama yang didasari kepentingan bersama dan di motori ide-ide pembaharuan agar peristiwa-peristiwa yang lalu tidak lagi terulang kembali. Pemecahan masalah kemudian muncul berbasiskan pemafahaman bersama hingga terbangunnya kesepakatan yang mengikat meski minimal masih berlaku pada komunitas-komunitas tertentu saja. Komunitas konservasi mangrove di desa Tambakrejo muncul menjadi satu perkumpulan yang merespon alam yang oleh masyarakat umum dianggap kurang bersahabat. Bagi komunitas ini, sesungguhnya manusialah yang kurang bersahabat dengan alam dan bukan sebaliknya.

Komunitas atau kelompok tersebut bernama Lembaga Masyarakat Konservasi Bakti Alam dengan unit usahanya *Clungup Mangrove Conservation* (CMC). Ia merupakan lembaga non

pemerintah yang berbentuk yayasan berlokasi di desa Tambakrejo kecamatan Sumbermanjing Wetan kabupaten Malang. Komunitas atau perkumpulan ini berkonsentrasi mengembangkan kawasan pantai Clungup sebagai kawasan wisata alam berbasis edukasi. Mereka mengelola pantai ini karena merasa memiliki kepedulian terhadap kelestarian dan penyelamatan lingkungan pesisir pantai.

Dalam perkembangannya *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) berfokus pada pengembangan wisata berbasis edukasi kepada masyarakat baik warga setempat ataupun para pengunjung (wisatawan). Inisiatif membangun wisata berbasis edukasi ini muncul dari keresahan bersama yang dialami oleh masyarakat akibat kerusakan hutan mangrove di seluruh pesisir pantai selatan khususnya di daerah kabupaten Malang. Rusaknya hutan mangrove ternyata juga memberi efek domino pada kerusakan ekosistem disekitar pantai. Dengan semakin berkurangnya mangrove terbukti dapat merusak ekosistem biota laut disekitar pantai tersebut yang kemudian berdampak pada ketidakseimbangan alam. Akumulasi peristiwa inilah yang mendorong komunitas CMC bergerak untuk membangun kesadaran kolektif kepada seluruh masyarakat setempat.

Komunitas atau kelompok ini memilih hutan mangrove sebagai konsentrasi utamanya karena pepohonan ini berfungsi sebagai penyangga keseimbangan kawasan pesisir pantai. Hutan mangrove sendiri adalah hutan yang berada dilingkungan perairan payau. Hutan ini banyak dipengaruhi oleh pasang dan surutnya air laut. Ia dapat berfungsi sebagai penyangga derasnya ombak yang datang dan ombak yang kembali ke arah pantai. Selain itu, mangrove juga berfungsi menjadi rumah bagi biota dan hewan laut lainnya.

Proses perjalanan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) sampai dengan saat ini tentu tidak semudah yang dibayangkan, didirikan sejak tahun 2004 mereka mengalami beragam permasalahan terutama dalam upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlangsungan alam sekitar kawasan pantai Clungup. Mereka sadar bahwa untuk membangun satu kawasan yang pro terhadap kelestarian lingkungan tidaklah bisa dilakukan dengan sendirian. Melalui yayasan lembaga masyarakat konservasi bakti alam, *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) dikembangkan dengan berbagai strategi. Salah satunya adalah strategi berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada. Para pegiat lingkungan di kawasan pantai Clungup ini sadar betul bahwa beberapa hal yang akan mereka kerjakan ini bukanlah hal yang kecil, akan tetapi merupakan hal besar yang membutuhkan energi besar sehingga membutuhkan

kolaborasi, pelibatan berbagai pihak mulai dari sektor publik hingga sektor privat. Para pegiat lingkungan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Konservasi Bakti Alam ini sadar bahwa untuk menyediakan kualitas pelayanan yang baik pada sektor wisata, pengembangan sektor-sektor dan komponen-komponen tersebut harus bersinergi dalam satu rangkaian yang kemudian disebut destinasi, yang tentunya tidak dapat berdiri sendiri (Wiyonoputri, 2008).

Mengapa kolaborasi dianggap sangat penting? Hasil beberapa studi literatur menunjukkan bahwa motivasi yang muncul pada kelompok pemangku kepentingan adalah kolaborasi akan menghasilkan capaian yang positif, capaian solusi untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan bisa dilakukan dengan cara yang *fair*, setiap pemangku kepentingan mempunyai kapasitas untuk berpartisipasi secara detail dalam pengelolaan (Gray, 1989). Dan kolaborasi yang dibangun oleh pemangku kepentingan di kawasan Pantai Clungup, mulai dari kelompok masyarakat, sektor publik hingga sektor privat dan unsur lainnya sangat penting untuk dilakukan, apalagi terkait dengan pengembangan obyek wisata berbasis edukasi ini. Demikian karena areal wisata berbasis edukasi di Kabupaten Malang masih sangat minim jumlahnya. Dari kompleksitas yang dialami oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam lembaga masyarakat konservasi bakti alam *Clungup Mangrove Conservation (CMC)* tersebut, dirasa perlu pengembangan kolaborasi antar para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lebih masif lagi. Penelitian ini bermaksud menganalisis dan mendeskripsikan strategi kolaborasi yang ideal dilakukan oleh kelompok masyarakat tersebut untuk mengembangkan wisata berbasis edukasi di pesisir pantai selatan Kabupaten Malang ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Pengambilan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara kualitatif dan dokumen- dokumen kualitatif. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (*Interactive Model of Analysis*) seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992).

Hasil Dan Pembahasan

Desa Tambakrejo dan Pengelolaan Wisata Pesisir Berkelanjutan

Dari Kota Malang, Desa Tambakrejo berjarak sekitar dua jam perjalanan. Desa ini memiliki pantai yang berada dalam wilayah rehabilitasi dan konservasi mangrove. Bersebelahan dengan Pantai Clungup terdapat Pantai Tiga Warna, yang merupakan kawasan konservasi dibawah naungan Perhutani. Adapun dalam pengelolaannya pihak Perhutani dibantu oleh masyarakat setempat. Kawasan ini kini memperoleh perhatian yang serius terutama paska rusaknya kawasan

hutan akibat penebangan hutan secara liar dan massal pada tahun 1990 an. Selain kawasan hutan, kawasan taman laut juga mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait. Perjalanan menuju desa tersebut menyajikan pemandangan yang indah diantara perbukitan dan hutan.

Desa Tambakrejo memiliki beberapa pantai yang sangat menarik bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Diantaranya adalah Pantai Sendang Biru, Pantai Clungup, Pantai Gatra dan Pantai Tiga Warna. Saat ini, pengelolaan beberapa pantai tersebut ada di bawah lembaga masyarakat Konservasi Bakti Alam. Program yang kini terbilang sukses adalah *Clungup Mangrove Conservation* (CMC). CMC ini berfokus pada konservasi mangrove dan juga menjaga kelestarian alam di wilayah pesisir pantai selatan Kabupaten Malang.

Konservasi Mangrove

Konservasi dan rehabilitasi melalui penanaman mangrove tidak hanya memberi dampak positif terhadap alam sekitar namun juga dapat memberi kontribusi yang signifikan untuk memajukan perekonomian masyarakat setempat. Menurut pengelola kawasan wisata *Clungup Mangrove Conservation* (CMC), tanaman mangrove juga memiliki nilai lebih secara ekonomi karena juga dapat menghasilkan produk-produk olahan mangrove seperti sirup, dodol, nastar hingga selali. Adapun daun mangrove dapat menjadi bahan baku utama dalam pembuatan teh, bumbu pecel dan rempeyek. Melalui pengembangan kawasan wisata mangrove yang baik juga dapat menstimulus kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem kawasan sekitar pantai. Pada gilirannya bahkan juga dapat dijadikan kawasan wisata edukasi yang memberikan manfaat besar bagi pendidikan warga. Sampai saat ini, peran yang tampak

dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam program pembangunan berkelanjutan ialah melalui aksi menanam dan merehabilitasi mangrove pada daerah yang memiliki pantai dengan tingkat kerusakan yang cukup parah sebagai akibat abrasi.

Clungup Mangrove Conservation (CMC)

Clungup Mangrove Conservation (CMC) berada di wilayah Pantai Clungup yang memang lokasinya berada cukup jauh dari jalan utama menuju Pantai Sendang Biru, lokasinya cukup tersembunyi dari titik keramaian. Kawasan ini pada masa reformasi 1998 sempat mengalami masa kritis karena hutan sekitar pantai banyak yang ditebangi oleh warga. Saat itu, aksi pembalakan liar memang tidak terkendali dan kenyataannya memang terjadi di banyak tempat di Jawa Timur seperti

halnya di hutan pantai selatan Kabupaten Banyuwangi. Krisis ekonomi saat itu serta euforia reformasi menjadi titik dimana puncak kerusakan hutan terjadi termasuk pada hutan mangrove di sekitar pantai selatan Kabupaten Malang ini. Pada awal tahun 2012, Saptoyo selaku ketua Lembaga Masyarakat Konservasi Bakti Alam yang mengelola kawasan pantai Clungup menginisiasi penghijauan kawasan pantai tersebut. Secara perlahan ia mulai mengajak warga setempat untuk bergabung melakukan aksi penghijauan kembali kawasan pantai.

Menurut Saptoyo, upaya merestorasi kawasan pantai Clungup ini bukanlah suatu pekerjaan yang mudah karena terdapat banyak kepentingan yang bermain didalamnya. Ada tambak dan lahan pertanian yang harus dibebaskan melalui ganti rugi karena sudah terlanjur digarap oleh warga setempat. Masih menurut Saptoyo, mentalitas warga setempat cenderung merasa tidak peduli dengan lingkungan yang semakin rusak. Sehingga mentalitas inilah yang menjadi pekerjaan pertama bagi Saptoyo dan kawan-kawannya untuk dirubah menjadi mentalitas yang peduli dengan kelestarian alam. Namun lama kelamaan, tingkat kepedulian warga semakin meningkat hingga mencapai 105 orang. Gerakan berikutnya yang dilakukan adalah melakukan penanaman 10.000 mangrove dengan melibatkan seluruh anggota komunitas tersebut. Mangrove tersebut ditanam dengan jarak tanam 3x3 meter setiap tahun.

Saat ini para pegiat lingkungan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Konservasi Bakti Alam melancarkan beberapa strategi untuk mendongkrak pengembangan wisata edukasi tersebut, diantaranya:

1. Mempromosikan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) melalui media sosial. Strategi ini dinilai sangat efektif dan efisien dilakukan oleh pihak CMC, tentu karena melihat perkembangan zaman yang semakin tanpa sekat ini. Era teknologi informasi saat ini begitu memungkinkan bagi setiap orang ataupun lembaga tertentu untuk mempromosikan produk unggulannya. Selain jangkauan yang lebih luas, media sosial kenyataannya memang memberikan kemudahan dalam menyampaikan beragam informasi secara cepat terkait perkembangan sesuatu hal, dalam hal ini tentu saja keberadaan wisata alam berbasis edukasi.
2. Adanya layanan paket wisata. Untuk lebih meningkatkan daya tarik wisatawan dan juga membangun kesadaran akan pentingnya kelestarian alam, CMC memberikan sebuah paket edukasi terkait mangrove dan juga diberikan bibitnya untuk ditanam langsung oleh para wisatawan. Cara ini menjadi pembeda dengan jenis wisata alam lainnya dimana para wisatawan hanya disajikan berbagai pemandangan alam saja tanpa dilibatkan dalam proses menjaga kelestarian alam itu sendiri.
3. Menjalinkan kerjasama dengan pemerintah, akademisi, kelompok masyarakat yang ada. Kerja sama ini bertujuan untuk semakin mengupgrade berbagai layanan dalam berwisata di areal Pantai Clungup.
4. Menjaga fasilitas wisata. Ini bertujuan agar pengunjung nyaman dan dapat menarik pengunjung lainnya secara ketok tular. Terkait kebersihan wilayah pantai Clungup misalnya, mereka menerapkan aturan yang sangat ketat. Setiap barang yang di bawa masuk pengunjung atau wisatawan akan diperiksa lagi jumlahnya saat mereka keluar dari areal wisata, bila terdapat ketidaksamaan maka pengunjung atau wisatawan akan dikenai punishment yang tegas berupa diminta kembali untuk mengambil sampah tersebut ditempat mereka membuang sebelumnya.
5. Budaya sebagai basis kekuatan. Kearifan lokal bagi mereka menjadi kekuatan untuk mengembangkan potensi wisata tersebut. Konsepsi khasanah Jawa mereka terapkan tentang bagaimana manusia harus bersikap terhadap alam. Sinergisitas antara manusia dengan alam akan memberikan dampak positif. Alam tidak akan menyajikan suatu keburukan tatkala manusia tidak menciptakan kerusakan

diatas bumi. Setidaknya itulah kosepsi pemahaman lokal tentang pentingnya bersinergi dengan alam sekitar. Selain itu, terdapat pula budaya lokal berupa panahan atau Jemparingan. Ini merupakan salah satu budaya panahan tradisional jawa. Jemparingan ini sebagai sarana untuk melatih pengendalian emosi diri.

Strategi Kolaborasi dengan Stakeholder Peran Stakeholder

Dalam pola *collaborative governance*, stakeholder yang ada masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan suatu obyek pekerjaan pembangunan. Pihak swasta misalnya berposisi sebagai penyuplai sumberdana finansial. Selain itu, pihak swasta sering dianggap memiliki kelebihan dalam hal kemampuan dan kemajuan serta kelengkapan teknologi penunjang. Sehingga tanggung jawabnya menjadi seputar pengerahan dan pemaksimalan seluruh sumberdaya yang mereka miliki sesuai kesepakatan yang telah dibangun diantara stakeholder yang ada.

Adapun peran pemerintah, Kwak. et. al (2009) mengemukakan bahwa terdapat lima aturan utama yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah:

- 1) Menyediakan lingkungan investasi yang menguntungkan.
- 2) Menciptakan kerangka hukum atau aturan yang memadai.
- 3) Membuat desain koordinasi dan kewenangan yang ideal bagi sistem kemitraan
- 4) Menentukan pemegang ijin yang tepat.
- 5) Terlibat secara aktif dalam siklus hidup proyek.

Saat ini, pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan wisata alam berbasis edukasi *Clungup Mangrove Conservation (CMC)* diantaranya kelompok masyarakat, pemerintah daerah, industri (swasta), dan universitas. Kelompok masyarakat (masyarakat sipil) keberadaannya diwakili oleh lembaga masyarakat Konservasi Bakti Alam dengan unit usahanya *Clungup Mangrove Conservation (CMC)*. Pihak pemerintah diwakili oleh pemerintah daerah Kabupaten Malang, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dari pihak swasta lebih pada sponsorship setiap ada even. Sistem kerjasama yang ada berupa *support* pendanaan pada setiap even yang diselenggarakan. Sedangkan dari pihak universitas melibatkan Universitas Brawijaya dan Politeknik Negeri Malang. Kedua universitas ini melalui beberapa pakar keilmuannya telah memberikan sumbangsih pemikiran bagi

pengembangan konsep keberlanjutan dan keseimbangan alam disekitar pantai Clungup.

Peran yang telah dilakukan oleh Lembaga masyarakat Konservasi Bakti Alam dengan unit usahanya *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) berupa inisiasi mengembalikan kawasan pantai Clungup seperti sedia kala saat belum terjadi kerusakan. Tidak cukup pada level inisiasi, mereka juga berperan menggerakkan masyarakat setempat untuk merubah cara pandang terhadap alam yang awalnya sangat acuh menjadi peduli. Saat tingkat kepedulian semakin tinggi, dengan bukti meningkatnya jumlah keanggotaan menjadi 105 orang, mereka mengkapitalisasi dalam bentuk gerakan nyata konservasi dan rehabilitasi kawasan pantai tersebut. Bahkan saat ini, komunitas inilah yang mengelola kawasan wisata alam berbasis edukasi tersebut.

Adapun pemerintah daerah Kabupaten Malang saat ini baru berperan sebatas memfasilitasi keikutsertaan Clungup Mangrove Conservation (CMC) dalam berbagai even yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Pada tahun 2017 kemarin, CMC berhasil memperoleh penghargaan sebagai wisata alam terbaik di Jawa Timur. Pasca itu, menurut masyarakat, pemerintah daerah cenderung belum banyak menyentuh atau terlibat pada hal-hal strategis pada upaya-upaya mengembangkan wisata alam berbasis edukasi ini.

Bahkan merujuk ke 5 peran pemerintah, Kwak. et. al (2009) diatas berupa penyediaan lingkungan investasi yang baik dan menguntungkan, menyediakan kerangka hukum dan aturan yang memadai, desain koordinasi dan kewenangan antar pemangku kepentingan, penentuan pemegang ijin hingga terlibat secara aktif dalam siklus hidup proyek kenyataannya baru satu saja

peran yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni berupa penentuan pemegang ijin. Sedangkan 4 peran lainnya, menurut Iswahyudi (anggota CMC), belum tampak dilakukan oleh pihak pemerintah. Kehadiran pemerintah Kabupaten Malang baru berupa pemberian ijin pada CMC untuk mengelola kawasan Pantai Clungup tersebut. Bahkan tingkat keterlibatan dalam siklus hidup proyek juga tidak begitu tampak dari mereka. Keterlibatan pemerintah daerah baru sebatas memfasilitasi CMC untuk ikut dalam beberapa event perlombaan yang diadakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adapun keterlibatan dalam mensupport inisiasi konservasi dan rehabilitasi dinilai belum tampak. Idealnya, bentuk keterlibatan pemerintah daerah adalah menyeluruh dari

hulu hingga ke hilir. Meski demikian, namun para pegiat lingkungan yang tergabung dalam CMC tetap memilih meneruskan cita-cita mereka untuk mengembangkan wisata alam berbasis edukasi tersebut meski peran yang dimainkan pihak pemerintah terbilang sangat minim.

Mencari Model Kolaborasi yang Ideal

Pola kerjasama atau bahkan kolaborasi antar *stakeholder* kini semakin dinamis. Bahkan dalam ruang lingkup kolaborasi tersebut saat ini telah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Dulu, sektor publik (pemerintah) dapat berperan lebih dominan dibanding dengan aktor lainnya. Ia dapat memainkan orkestra kebijakan/keputusan sesuai kehendak dan wewenang yang ia miliki. Seiring berjalannya perkembangan keilmuan, konsepsi lama tersebut mulai runtuh dan muncul konsepsi baru tentang perlu kesetaraan dalam memainkan peran. Pemerintah, masyarakat sipil, swasta, hingga perguruan tinggi atau universitas secara bersama-sama dan porsi yang sama dapat mengembangkan suatu proyek kerjasama dengan prinsip kesetaraan.

Meski kolaborasi yang telah terbangun pada program konservasi alam pantai Clungup tersebut telah berjalan cukup baik, namun tentu tidak bisa lepas dari kritik. Selain kritik yang perlu kita alamatkan kepada pihak pemerintah daerah dengan peran sertanya yang cukup minim, terdapat satu kritik lagi yang perlu segera disikapi, yakni memposisikan lingkungan alami masyarakat sekitar sebagai salah satu aktor kunci yang tidak kalah penting. Model *Quintuple Helix* menjelaskan tentang begitu pentingnya pembangunan disekitar kita agar tidak hanya di dominasi oleh kepentingan ekonomi, politik dan masyarakat. Model *Quintuple Helix* memang menekankan suatu transisi sosio-ekologis yang diperlukan oleh pihak masyarakat dan ekonomi. *Quintuple Helix* memiliki kecenderungan lebih sensitif terhadap isu-isu ekologis, sehingga model ini tampaknya sangat tepat bila diterapkan untuk menentukan bagaimana kolaborasi yang ideal bagi seluruh stakeholder yang ada.

Quintuple Helix memberikan posisi yang signifikan bagi lingkungan alami masyarakat untuk memperoleh perhatian yang lebih. Bahkan, ia idealnya harus dipandang sebagai pendorong bagi produksi pengetahuan dan inovasi. Pada level selanjutnya diharapkan dapat memberi peluang bagi ekonomi pengetahuan. Menurut Carayannis, Model ini berkeinginan untuk mendukung adanya situasi win-win antara

ekologi, pengetahuan dan inovasi, sehingga berikutnya dapat menciptakan sinergi antara sektor ekonomi, masyarakat dan demokrasi (Carayannis, 2012).

Model *Quintuple Helix* bahkan tidak hanya menyajikan perihal keharusan interaksi dan kolaborasi yang sehat antar *stakeholder* yang ada, lebih dari itu ia menghendaki adanya interaksi kolektif dan pertukaran pengetahuan melalui lima subsistem berikut:

- 1) Sistem Pendidikan, yang mendefinisikan dirinya mengacu kepada universitas sebagai produsen pengetahuan. Dalam Helix ini dibutuhkan “modal manusia” seperti guru, ilmuwan, peneliti.
- 2) Sistem ekonomi, di dalamnya terdiri dari industri atau sektor swasta. Helix ini berkonsentrasi pada wilayah “modal ekonomi”, misalnya kewirawsastaan, teknologi, produk dan lain-lain.
- 3) Lingkungan alam, sebagai subsistem ketiga ia sangat menentukan (determinan) untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan memberi orang dengan “modal alam”. Contohnya dapat seperti sumberdaya, variasi hewan, tanaman dan lain-lain.
- 4) Masyarakat berbasis media dan budaya, masyarakat (publik) dapat mengintegrasikan dan menggabungkan dua bentuk “modal”. Masyarakat yang telah memiliki akar budaya yang kuat (tradisi dan nilai) dapatlah dipandang telah memiliki “modal sosial”, selanjutnya mereka tinggal menggabungkan kekuatan lain yang telah mereka miliki berupa helix media berbasis publik (internet dan surat kabar) yang dapat kita sebut “modal informasi” (jejaring sosial, komunikasi, berita).
- 5) Sistem politik, ia berposisi merumuskan keputusan dimana negara atau pemerintah memiliki “modal politik dan hukum”.

Quintuple helix ini dapat dijadikan model atau strategi dalam membangun kolaborasi yang ideal bagi para *stakeholder* karena seluruh modal yang ada diatas dapat disatu padukan menjadi satu kekuatan bersama untuk menyelesaikan beragam persoalan yang sering ditemui. Masyarakat sipil dalam hal ini lembaga masyarakat Konservasi Bakti Alam dengan unit usahanya *Clungup Mangrove Conservation (CMC)* tidak akan lagi bekerja sendiri atau hanya mengandalkan jejaring

dari kekuatan yang dimiliki oleh universitas saja. Sinergisitas yang telah terjalin antar keduanya sudah waktunya ditambah dengan energi lain dari pihak swasta. Universitas dengan berbagai produk penelitian ilmiahnya juga harus memperoleh respon positif tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga dari pihak pemerintah. Pemerintah kemudian menghadirkan satu keputusan politik berupa kebijakan yang mampu menjadi payung teduh bagi seluruh *stakeholder* yang ada. Dan yang tidak kalah penting adalah peran helix lingkungan alami. Lingkungan alami masyarakat harus tetap terjamin eksistensinya bahkan ia harus menjadi pendorong munculnya pengetahuan baru yang pada gilirannya diharapkan dapat menginspirasi pembangunan berkelanjutan di wilayah wisata alam berbasis edukasi pantai Clungup.

Pantai Clungup yang memiliki ekosistem alam yang bervariasi haruslah tetap terjaga kelestariannya. Kolaborasi antar *stakeholder* pembangunan acapkali mengeliminir kepentingan alam. Keseimbangan alam sering tidak diperhatikan demi menggapai keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Dalam strategi kolaborasi ala interaksi quintuple helix ini sama sekali tidak memberi kesempatan bagi aktor-aktor yang ada untuk menghilangkan eksistensi alam. Sisi ekologis menjadi perhatian serius bagi strategi kolaborasi ini. Sensitifisme terhadap keberlanjutan lingkungan merupakan prioritas yang tidak dapat ditawar lagi. sesungguhnya, hal ini juga sangat relevan dengan cita-cita yang telah lama di impikan oleh masyarakat sekitar. Bahkan mereka menggerakkan tradisi kearifan lokal berupa menghidupkan khasanah kearifan jawa kuno tentang pentingnya sinergisitas antara alam dengan manusia.

Simpulan

Strategi kolaborasi yang ideal untuk pengembangan wisata berbasis edukasi di kawasan *Clungup Mangrove Conservation (CMC)* Desa Tambakrejo Kabupaten Malang dapat dilakukan dengan model *Quintuple Helix*, mengingat kepentingan bersama dari seluruh *stakeholder* adalah mengembangkan satu wahana edukasi dengan lingkungan yang terjamin kelangsungannya. Melalui *Quintuple Helix* ini dapat memberikan modal tambahan berupa manajemen berbasis kualitas pembangunan yang efektif, keseimbangan alam yang terjamin, serta garansi terhadap generasi mendatang agar tetap merasakan keberlanjutan lingkungan yang ada. Melalui kolaborasi ini, diharapkan kesetaraan posisi tawar antar seluruh pemangku kepentingan dapat terjaga

dengan baik. Tidak ada satupun aktor yang menempati posisi subordinan. Semua setara termasuk lingkungan alam.

Daftar Pustaka

- Balogh, S, (2011). An integrative Framework for Collaborative Governance, *Journal of Public Administration Research and theory* 22: 1-29.
- Carayannis E, G., and Campbell D. F. J. (2012), The Quintuple Helix Innovation Model: global warming as a challenge and driver for innovation, *Journal of Innovation and Entrepreneurship* 2010, 1:2
- Gray, Barbara, *Collaborating: Finding Common Ground For Multi-Party Problems*, San Fransisco, CA: Jossey-Bass 1989
- Kwak, Young Hoon (et al), 2009. Towards a Comprehensive Understanding of Public Private Partnerships for Infrastructure Development, *California Management Review* Vol. 51, No 2 hal 53.
- Miles, Matthew B, dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Edisi Terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Subarsono, Agustinus, 2016. *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif isu-isu Kontemporer*. Gava Media, Yogyakarta.